

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar

Wahyu Karunia Galib¹, Nurlinah², Andi Lukman Irwan³, Rasyid Thaha⁴, Ashar Prawitno⁵, Nurul Alfiani⁶

^{1,2,3,4,5,6} Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, 90245
E-mail Korespondensi : wahyukaruniagalib@gmail.com

ABSTRACT

Clean water is water that is safe for daily use and meets health standards, therefore, it is the government's responsibility to ensure the basic water supply needs of the citizens are met. The study aims to explore the government's involvement in ensuring clean water through qualitative research employing a descriptive research methodology. The methods used to collect data included interviews, observation, and documentation.

The findings indicated that the key indicators included planning, carrying out, and overseeing tasks related to clean water activities. Based on these signs, it was discovered that the performance of the Public Works Office's role was not yet at its best. This situation in the Untia Urban Village area, situated on the coast, makes it challenging to access clean water due to the complexity of the drilling system. Success in providing clean water can be attained through implementing tools or machines to lower salt levels underground in coastal regions, collaborating with clean water agencies, and developing a detailed master plan for improved clean water distribution.

Keywords: *Clean Water, Provision, Role of Government*

ABSTRAK

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang sesuai standar kesehatan, sehingga pemerintah harus menyediakan air bersih sebagai hak dasar warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyediaan air bersih dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian menunjukkan bahwa tiga indikator peran tersebut adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang air bersih. Dari penunjuk-penunjuk tersebut, disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum masih belum mencapai tingkat optimal. Penyediaan air bersih di Kelurahan Untia sulit karena lokasinya di wilayah pantai, sehingga sistem pengeboran tidak efektif untuk mendapatkan air bersih. Mencapai kesuksesan dalam penyediaan air bersih bisa dilakukan dengan memasang peralatan yang dapat mengurangi kadar garam dalam tanah di wilayah pesisir, bekerjasama dengan lembaga penyedia air bersih, dan merancang rencana induk yang lebih terstruktur untuk penyediaan air bersih.

Kata Kunci: *Air Bersih, Penyediaan, Peran Pemerintah*

1. PENDAHULUAN

Akses pada air bersih dan sanitasi dianggap sebagai hak asasi manusia yang penting, dimana setiap individu seharusnya mendapat akses yang sama terhadap layanan air dan sanitasi. Karena air sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, menjaga kesehatan manusia, dan melindungi ekosistem, manajemen air menjadi sangat vital. Walaupun merupakan bagian dari tujuan yang penting ini, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar (Bayu et al., 2020)

Kehidupan manusia sangat membutuhkan air bersih karena memiliki peran yang sangat penting. Air bersih digunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Ketersediaan air bersih yang berkualitas baik akan sangat membantu kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan. (Kaihena et al., 2024)

Air yang dimaksud berasal dari berbagai sumber air, baik yang terletak di permukaan tanah maupun di bawahnya. Dalam situasi global saat ini, tanggapan yang

adaptif dan inovatif diperlukan untuk memastikan semua penduduk memiliki akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap air bersih (Zulhimi et al., 2019).

Saat ini, lebih dari 1 miliar individu tidak memiliki akses ke air dan lebih dari 2,4 miliar orang tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar. Mayoritas krisis air disebabkan oleh tindakan manusia. Ini bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan air atau kurangnya dana dan teknologi yang sesuai merupakan faktor yang sangat penting (OECD, 2022). Setiap negara di seluruh dunia termasuk Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap penyediaan air bersih. Pertumbuhan kota yang cepat dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahun menuntut kenaikan kebutuhan air bersih karena air bersih adalah kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. (Syaifullah & Manzilati, 2012)

Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas PU Kota Makassar, pada tahun 2021 sebanyak 1.074.339 penduduk telah terpenuhi kebutuhan air minum yang terlindungi dari total populasi kota Makassar sebesar 1.489.912 jiwa, atau setara dengan 72,35%. Ini

menunjukkan bahwa masih ada warga Kota Makassar yang belum bisa mengakses air bersih. Pemenuhan kebutuhan air di kota Makassar terbagi menjadi dua, yaitu melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Mayoritas sistem perpipaan dikelola oleh PDAM sekitar 63,57%, sementara 3,78% dari sistem non perpipaan adalah sumur dalam yang didanai oleh APBD Kota Makassar.

Kebutuhan air bersih setiap tahun bervariasi tergantung pada jumlah pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin rumit kebutuhan akan air bersih (Wadu et al., 2020). Sama seperti perkembangan Kota Makassar yang cepat, kebutuhan akan air bersih juga meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas penduduknya yang berkembang pesat. Kota Makassar menghadapi kesulitan karena tingginya permintaan air bersih namun pasokan air belum mencukupi, sehingga beberapa wilayah seperti Kelurahan Untia masih kekurangan air bersih dalam waktu yang lama.

Oleh karena itu, melihat permasalahan yang terjadi maka perlu ditinjau kembali dengan melakukan penelitian terkait peran pemerintah dalam penyediaan air bersih, Dengan menggunakan alat analisis peran dari pemerintah dengan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan/dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu: Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*) (Rasyid, 2000) yang kemudian menjadi tanggung jawab instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar No 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Bagian Keempat Pasal 14 yaitu Seksi Sanitasi dan Air Bersih, Adapun indikatornya yaitu: Perencanaan Kegiatan di bidang air bersih, Pelaksanaan kegiatan dibidang air bersih, dan pembagian tugas dan mengontrol kegiatan dibidang air bersih.

Kelurahan Untia yang merupakan kawasan pesisir mengalami kekurangan air bersih selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut dikarenakan pengaruh gerakan pasang surut yang mengakibatkan air laut bercampur dengan air tawar sehingga kualitas air di Kelurahan Untia menjadi payau/asin. Serta masuknya industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia yang menggunakan air dengan skala besar dan hanya menggunakan satu aliran perpipaan dengan masyarakat yang berasal dari PDAM. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena kawasan industri tersebut lebih banyak menarik air dibandingkan masyarakat dan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia (Nurfaizy et al., 2020)

Tabel 1. Kebutuhan Kawasan Air Bersih Kawasan Industri Kota Makassar

Deskripsi	Standar Kebutuhan Air Industri Rata-Rata Per Hari (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air	
		2021	2022
Industri Makanan dan Minuman	65.000	31.804	37.776
Industri Furniture Kayu dan Rotan		18.144	19.126
Industri Kertas		6.831	7.449
Industri Plastik		16.180	17.162
Industri Bahan Bangunan		23.114	25.012
Industri Alat Berat		53.996	57.293
Industri Tekstil		47.403	50.699
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki		5.132	5.358
Industri Farmasi/Produk Obat		55.26	60.27
Industri Aluminium		16.837	18.285

Sumber: Makassar Dalam Angka, 2022

Wilayah pesisir Kelurahan Untia memiliki keterbatasan sumber daya air karena intrusi air laut, yang menyebabkan kualitas air menjadi asin akibat pencampuran air laut dan gangguan sanitasi lingkungan, serta privatisasi dan penggunaan air oleh industri. (Nurfaizy et al., 2020)

Berdasarkan observasi awal, menurut Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Untia, mengatakan sejak kemarau warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih. Hal itu terjadi lantaran PDAM hanya memiliki satu pipa dengan industri. Masyarakat mengaku miris dengan kehidupan di Kelurahan Untia lantaran kesulitan mendapatkan air bersih, dikarenakan penggunaan air dengan skala besar yang dilakukan oleh industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia dan minimnya pelayanan yang mengakibatkan air keran atau air bersih tidak lagi mengalir ke rumah-rumah masyarakat sehingga masyarakat di Kelurahan Untia harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya sebesar Rp.500.000– Rp.800.000 per bulan. Berbagai upaya yang dilakukan seperti pembuatan sumur gali tidak terapkan dengan baik disebabkan pencemaran dari limbah industri dan kualitas air tersebut payau/asin sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu pembuatan sumur bor dan penampungan air yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan kondisi geografis wilayah yang berada di pesisir yang mengakibatkan air yang didapatkan dari hasil pengeboran masih payau. Hal tersebut sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terkait penyediaan air bersih.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan sistem penyediaan air bersih di Kelurahan Untia terindikasi belum terlaksana secara optimal dan belum dapat ditangani secara tuntas dikarenakan minimnya sarana pelayanan air bersih serta buruknya kualitas lingkungan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan air bersih di Kelurahan Untia.

Penyediaan air bersih adalah kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan regulasi UU No.23 Tahun 2014 dan PP No.38 Tahun 2007. Kedua kebijakan tersebut menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota wajib bertanggung jawab terhadap penyediaan air bersih karena berkaitan dengan pelayanan prasarana dasar. Dalam situasi ini, aktivitas yang harus dipersiapkan/dilakukan harus didasarkan pada area Layanan (*service*) dalam bentuk perencanaan aktivitas/kebijakan esensial dan teknis pengelolaan air bersih yang akan diaplikasikan kepada masyarakat, Pemberdayaan (*empowerment*) bagaimana perencanaan kebijakan/aktivitas terkait pengelolaan air bersih dapat berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, dan pembangunan (*development*) hasil dari kebijakan pengelolaan air bersih tersebut dapat dilihat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sinergi yang efektif dari berbagai pihak diperlukan dalam memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat di setiap wilayah.

Hal tersebut masih menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Makassar dikarenakan tingginya permintaan akan pelayanan air bersih saat ini belum tertangani dengan baik salah satunya di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Kelurahan Untia yang merupakan kawasan daerah pesisir di wilayah timur Makassar seringkali mengalami kelangkaan air bersih dan rendahnya mutu air sumur gali, yang merupakan sumber utama air bagi penduduk Kelurahan Untia.

2. METODE

Penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan fokus pada Kelurahan Untia yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Biringkanaya. Wilayah Kelurahan Untia memiliki luas 2,89 km² dengan populasi sebanyak 2.589 orang dan berada pada elevasi 1 meter di atas permukaan laut sebagai bagian dari daerah pantai. Untia berbatasan dengan Maros Kabupaten di sebelah utara, Kecamatan Marusu di bagian utara, Desa Bulurokeng di sisi timur, Kecamatan Biringkanaya di wilayah timur, Desa Bira di sudut selatan, dan Kota

Makassar Selat di sepanjang sisinya barat. Kelurahan Untia di tepi pantai telah menghadapi masalah kekurangan air bersih selama bertahun-tahun. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan tinggi rendahnya air laut yang mengakibatkan pencampuran air laut dan air tawar, membuat kualitas air di Desa Untia menjadi payau/asin.

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih fokus pada makna daripada generalisasi. (Ahyar et al., 2020)

Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data akan dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah yang diusulkan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan konfirmasi (Bungin, 2003)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Kegiatan dalam Perencanaan Kegiatan di Bidang Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah proses penentuan aktivitas di masa mendatang. (Arifudin et al., 2021) Perencanaan melibatkan aspek temporal dan spatial, sehingga butuh pemahaman tentang kejadian masa lampau dan yang akan datang, beserta penyebarannya secara geografis. (Rustiadi et al., 2018)

Perencanaan air bersih oleh Dinas Pekerjaan Umum Seksi Air Bersih termasuk menyusun RKA dan DPA, serta melakukan pendataan perumahan yang rawan air bersih. Dalam melaksanakan perencanaan, diperlukan perencanaan yang matang dan disusun bersama untuk memastikan kesuksesan dan kelangsungan organisasi tersebut. Sama halnya dengan harusnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melaksanakan rencana untuk pertumbuhan dan menjalankan kegiatan yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, mengenai perencanaan kegiatan di bidang air bersih mengatakan bahwa:

“Perencanaan kegiatan di Dinas PU itu kami selalu melakukan perencanaan mulai dari penyusunan rencana kerja, kemudian kita juga susun anggaran untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan sampai pada tahap pelaksanaan. Dan kami juga melakukan pendataan di wilayah yang susah air bersih dan yang di data itu seperti jumlah penduduk yang terlayani air bersih dari Dinas PU.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bahwa perencanaan kegiatan di bidang air bersih sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan melakukan penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, serta melakukan pendataan wilayah yang terlayani air bersih.

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kota Makassar yang dikelola dan dikembangkan	Makassar	49,84%	15.373.967.900	PAD	50,10%	24.199.017.000
Supervisi Pembangunan Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi SUpervisi Pembangunan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Makassar	1 Dok	1.355.817.500	PAD	15 Kec	186.590.000
Pembangunan SPAM Jaringan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik	Makassar	1,2 liter/detik	6.660.772.200	PAD	8 Lokasi	8.103.241.867
Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tertentu yang terbangun						
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Makassar	1,2 liter/detik	4.437.517.200	PAD	6 Lokasi	3.394.766.368
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan rumah yang terlayani melalui pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Tematik Tertentu	Makassar	200 SR	707.900.600	PAD	4000 S	10.672.047.437
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah Kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Makassar	2 Penyelenggaraan SPAM	143.461.000	PAD	15 Lokasi	218.855.000
Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Makassar	5 unit	2.068.499.400	PAD	5 Lokasi	1.623.516.328

Gambar 1. Rencana Kerja/Kegiatan dan Pendanaan Bidang Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2023

Disamping itu Bapak Suryadi selaku Staf Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menambahkan terkait perencanaan kegiatan air bersih yang mengatakan bahwa:

“Di dinas PU itu kami melakukan kegiatan survei setiap tahun, jadi kita survei wilayah-wilayah yang susah air bersih disamping itu kita jg menindaklanjuti surat-surat yang masuk terkait usulan dari warga atau pemerintah setempat yang mengatakan wilayahnya susah air bersih dan itu yang kita tindak lanjuti dengan melakukan survei dan kita buat kan perencanaan terkait pembangunan sarana air bersih di wilayah tersebut mulai dari penyusunan rencana yang akan dilakukan, anggaran, sampai pada pelaksanaannya.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Suryadi di atas peneliti menemukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sudah melakukan perencanaan setiap tahun melalui kegiatan survei atau pendataan di wilayah rawan air bersih Kegiatan survei

tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari usulan masyarakat dan pemerintah setempat terkait wilayah yang rawan air bersih.

Tabel 2. Kebutuhan Air Bersih Kelurahan Untia

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air(liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m3)
2019	2090	60	45,77
2020	2150		47,08
2021	2235		48,94
2022	2336		51,16
2023	2438		53,40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2023

Menurut data yang disajikan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melakukan survei di beberapa kecamatan di Kota Makassar untuk mendata penduduk yang mendapatkan pasokan air bersih di Kelurahan Untia. Selanjutnya, Bapak Alwan Januar Setiawan selaku Lurah di Kelurahan Untia menambahkan bahwa:

“Memang betul perencanaan pembangunan sarana air bersih di kelurahan itu awalnya kami menyurat dulu ke Dinas PU dengan mengajukan permohonan untuk dibangun sarana air bersih. Setelah itu Dinas PU lakukan survei kesini dan lakukan perencanaan pembangunan sarana air bersih.” (Wawancara pada tanggal 9 April 2023)



Gambarnya menampilkan contoh surat yang meminta pembangunan sarana dan prasarana air bersih: **Gambar 2.** Surat Permohonan Pembangunan Sarana dan Prasaran. Sumber: Kelurahan Untia, 2023

B. Pelaksanaan Kegiatan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Pelaksanaan Kegiatan adalah eksekusi dari sebuah rencana yang telah direncanakan dengan cermat (Rochmah, 2013). Implementasi adalah serangkaian tindakan yang telah dipersiapkan dan diatur dengan semua elemen pendukung seperti peralatan, sumber daya manusia, lokasi, dan prosedur operasional standar untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Sebuah serangkaian langkah yang dilakukan setelah program atau kebijakan disetujui terdiri dari pengambilan keputusan serta langkah strategis dan operasional agar tujuan program tercapai (Sumiaty, 2021).

Dalam rangka memahami peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam pelaksanaan kegiatan terkait air bersih, peneliti berbicara dengan Ibu Nuraeni Bakiman, Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, yang menyampaikan:

“Kita kalau di Dinas PU itu menyediakan sistem pengeboran, kita sediakan mulai dari sumur bor, meterannya, tandon atau penampungannya, dan ada jaringan pipa untuk disambung ke rumah-rumah warga. Untuk di Kelurahan Untia kita sudah adakan program Pamsimas melalui sistem pengeboran yang kami buat cuman disana wilayahnya susah untuk dapat air bersih karena Kelurahan Untia itu di pinggir dekat pulau jadi air yang ditarik dari bawah tanah itu kadang asin sehingga debit air bersih yang dikeluarkan sedikit dan juga tempat dari alat Pamsimas itu jauh dari rumah-rumah warga. Jadi untuk sekarang sarana yang dibangun disana itu bisa dikatakan tidak berjalan maksimalmi.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bahwa pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih sudah dilakukan di Kelurahan Untia tetapi masih perlu ditindaklanjuti terkait pembangunan sarana di wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan, sarana air bersih di Kelurahan Untia tidak berjalan maksimal karena berada di wilayah pesisir sehingga air yang dihasilkan dari sistem pengeboran masih asin.

Untuk memberikan hasil penelitian yang lebih konkret dan sesuai dengan realitas, keterlibatan masyarakat dan pemerintah setempat sebagai objek dalam proses pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih di Kelurahan Untia sebagai informan sangat penting. Hal ini membantu peneliti melakukan analisis terhadap indikator peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih. Karena itu peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat dan pemerintah setempat. Pertama, dengan Ibu Wuriyanti Saptorini selaku Kepala Seksi Ekbang Kecamatan Biringkanya mengatakan bahwa:

“Kalau di wilayah yang susah air bersihnya seperti di Kelurahan Untia itu ada Pamsimas yang merupakan program dari pemerintah cuman

memang alat dari Pamsimas belum mampu menjangkau seluruh rumah-rumah warga jadi penyediaan air melalui pamsimas masih sangat terbatas.”

Kemudian diperjelas lagi dengan Bapak Alwan Januar Setiawan selaku Lurah di Kelurahan Untia mengatakan bahwa:

Memang sudah ada sarana yang disediakan oleh pemerintah kota melalui program Pamsimas dan sumur bor, tapi karna sistemnya itu juga pake sistem pengeboran dan itu ada batas pengeborannya cuman sekitar 100 meter ke bawah tanah jadi alatnya itu masih susah untuk dapat air bersih sehingga hasilnya masih asin dan pipanya juga sudah rusak tidak terpakai. Ada juga penampungan besar yang sudah dibangun beserta pipa-pipanya untuk disambung kerumah warga tapi memang debit air disini yang susah sehingga untuk sekarang tidak terpakai.” (Wawancara pada tanggal 9 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Alwan Januar Setiawan selaku Lurah di Kelurahan Untia peneliti melihat pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum di Kelurahan Untia sudah dilaksanakan melalui pembangunan prasarana akan tetapi sistem pengeboran yang dilakukan masih susah untuk mendapatkan air bersih sehingga hasilnya tidak maksimal dengan yang jumlah 297 Jiwa/127 KK yang bisa mengakses sumur bor tersebut. Hal serupa juga disampaikan Dg. Ati selaku masyarakat Kelurahan Untia mengatakan bahwa:

“Adaji dulu itu pembangunan Pamsimas cuman sekarang tidak berfungsi sudah lama tidak terpakai karna memang debit air disini kurang dan kalau sumur bor juga disini tidak bagus airnya hasilnya itu masih asin karena disini dekat dengan laut dan itu masyarakat sudah coba pakai pengeboran tapi tidak bisa dapat air bersih.

Selanjutnya, Ibu Sari selaku Ketua RT 003 Kelurahan Untia mengatakan bahwa:

“Kalau program Pamsimas dulu ada sampai pipanya masuk kesini dan dialirkan kerumah-rumah warga tetapi sekarang sudah tidak adami karena jalanan juga disini sudah diperbaiki jadi pipanya banyak yang rusak dan sampai sekarang sudah tidak terpakai lagi dan ada juga sumur bor tetapi masih tidak bisa dipakai karna airnya masih asin.” (Wawancara pada tanggal 29 Maret 2023)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Sari selaku Ketua RT 003 Kelurahan Untia menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih di Kelurahan Untia melalui pembangunan prasarana sudah dilakukan akan tetapi prasarana tersebut tidak lagi berfungsi.

Tabel 3. Data Pansimas Yang Berfungsi dan Tidak Berfungsi di Kec. Biringkanaya, Kel.Untia

No	Program/ Kegiatan	Kelurahan	Opsi Sarana	Ket.
1	Program Pansimas	Bulurokeng	Sumur Bor	Berfungsi
2	Program Pansimas	Sudiang	Sumur Bor	Berfungsi
3	Program Pansimas	Paccerakkang	PDAM	Berfungsi
4	Program Pansimas	Pai	Sumur Bor	Berfungsi
5	Program Pansimas	Daya	PDAM	Berfungsi
6	Program Pansimas	Sudiang	Sumur Bor	Tidak berfungsi
7	Program Pansimas	Sudiang Raya	Sumur Bor	Tidak berfungsi
8	Program Pansimas	Pai	Sumur Bor	Tidak berfungsi
9	Program Pansimas	Untia	Sumur bor	Tidak berfungsi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2023

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara terkait indikator ini, peneliti melihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar masih belum maksimal dalam melakukan kegiatan di bidang air bersih melalui pembangunan prasarana seperti terlihat di tabel 3 masih ada 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Biringkanaya terkhusus kelurahan Untia terdapat Pansimas berupa sumur born yang sudah tidak berfungsi karena faktor lingkungan dari Kelurahan Untia. Hasil dari analisis tersebut didasari oleh hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dari masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga mengacu dari berbagai sudut pandang.

Pelaksanaan kegiatan merupakan upaya untuk mewujudkan ataupun merealisasikan sebuah rencana dimana secara kompleksitas dapat diartikasikan suatu upaya menjalankan ataupun menggerakkan anggota dan mendorong yang lain untuk mewujudkan suatu rencana menjadi realisasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawab suatu organisasi.

C. Pembagian Tugas dan Mengontrol Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Air Bersih

Pembagian tugas adalah kegiatan untuk memberdayakan sumberdaya yang ada melalui kerjasama antara *stakeholder* yang terlibat didalamnya secara efektif dan efisien (Susan, 2019). Sedangkan, mengontrol kegiatan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan karena berperan menjamin tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan.

Untuk melihat apakah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melakukan pembagian tugas dan

mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan mengatakan bahwa:

“Kalau persoalan koordinasi kami biasanya melakukan rapat koordinasi dengan BPSPAM dan pihak dari PDAM, kita bahas kegiatan yang ingin dikerjakan terkait pembangunan sarana air bersih seperti pembuatan sumur bornya, penambahan debit air dan juga jaringan perpipaan yang dilakukan bersama dengan PDAM.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2023)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bahwa pembagian tugas yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sudah dilakukan melalui koordinasi antara pihak BPSPAM dan PDAM Kota Makassar. Selanjutnya dijelaskan lagi oleh Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terkait pengawasan kegiatan di bidang air bersih dan mengatakan bahwa:

“Untuk pengawasan kegiatan ada yang dinamakan tim teknis dari Dinas PU, tim teknis itu yang turun ke wilayah untuk mengontrol keadaan atau kegiatan yang dilakukan di lapangan apakah sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang dibuat. Kalau terjadi ketidaksesuaian kami tanyakan dan kalau ada yang melanggar kami berikan peringatan.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2023)

Gambar 2. Pengawasan Kegiatan Bidang Air Bersih



Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
 Sumber: Website portal berita media Rakyat News Makassar, 2022

Dari ilustrasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar diawasi oleh Plh Kabid Prasarana saat meninjau sarana dan prasarana air bersih. Tujuannya adalah untuk memastikan keberfungsian dan kesesuaian sarana tersebut dengan perencanaan awal.

Dari hasil wawancara tentang pemberian tugas dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di sektor air bersih, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan tindakan ini. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, koordinasi telah dilakukan dengan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk meningkatkan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM dan PDAM Kota Makassar. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar juga sudah menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih.

4. KESIMPULAN

Dengan merujuk pada hasil penelitian pada bagian sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam menyediakan air bersih di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan faktor-faktor yang memengaruhi penyediaan air bersih seperti yang berikut:

- a. Perencanaan Kegiatan di Bidang Air Bersih, pada indikator ini ditemukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum sudah melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang air bersih melalui penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran kegiatan, dan pencatatan terhadap daerah yang rentan kekurangan air bersih. Manajemen dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota dengan target pencapaian kinerja 49% sesuai dengan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pengawasan Pengembangan/Perluasan/Perbaikan SPAM dengan 1 dokumen, Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di daerah perkotaan dengan target 8 lokasi dan debit air 1,2 liter/detik, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di perkotaan dengan target 6 lokasi dengan debit air 1,2 liter/detik, Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM di perkotaan dengan 200 sambungan rumah yang dilayani melalui pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Tematik tertentu, Pengembangan SDM dan struktur organisasi pengelolaan SPAM dengan 2 penyelenggaraan SPAM dan pemeliharaan SPAM di perkotaan yang terdiri dari 5 unit.
- b. Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Air Bersih, pada indikator ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar masih belum maksimal dalam melakukan kegiatan di bidang air bersih melalui pembangunan prasarana. Hal tersebut dikarenakan Kelurahan Untia berada di wilayah pesisir sehingga air yang dihasilkan dari sistem pengeboran masih payau/asin. Berdasarkan data program kegiatan air bersih, jumlah KK/Jiwa yang mendapatkan aliran sumur bor yaitu 122 KK /297 Jiwa. Seiring berjalannya waktu Pansimas sumur bor yang telah dibangun sudah tidak lagi berfungsi.
- c. Pembagian tugas dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di sektor air bersih dilakukan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan berkoordinasi bersama BPSAM dan PDAM Kota Makassar. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sudah mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pasokan air. Dengan melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas dan infrastruktur air bersih serta proses pengelolaannya, kelompok pengelola sarana prasarana air minum (KPSAM) telah mendapatkan persetujuan dari pihak Kelurahan untuk mengelola Sarpras tersebut.

Dalam usaha untuk meningkatkan penyediaan air bersih, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah direkomendasikan oleh peneliti untuk melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menyediakan prasarana air bersih berupa alat atau mesin yang dapat mengurangi kadar garam di bawah tanah untuk di daerah pesisir.
2. Melakukan kerja sama dengan instansi-instansi penyedia air bersih.
3. Kontinuitas program pengelolaan air bersih yang melibatkan semua pihak (pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat) diperlukan. Peraturan Daerah mengenai pengaturan sumber air bersih juga perlu dibentuk.
4. Memperbaiki regulasi terkait penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.
5. Segera membuat rencana induk untuk penyediaan air bersih yang lebih terencana dan terpadu melalui jaringan perpipaan dan jaringan bukan perpipaan pada wilayah yang rawan air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Juliana Sukmana, D., Auliya Himatul, N., Andriani, H., Asri Fardani, R., Ustiawaty, J., Fatmi Utami, E., & Rahmatul Istiqomah, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1). Pustaka Ilmu. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Arifudin, M., Zahara Sholeha, F., & Fikriya Umami PEMKAB Tulungagung, L. (2021). PLANNING (PERENCANAAN) DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 162–183. <https://doi.org/10.21154/MAALIM.V2I2.3720>
- Bayu, T., Kim, H., & Oki, T. (2020). Water Governance Contribution to Water and Sanitation Access Equality in Developing Countries. *Water Resources Research*, 56(4). <https://doi.org/10.1029/2019WR025330>
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Cetakan Pertama). Raja Grafindo Persada .
- Kaihena, F. I., Tetelepta, E. G., Manakane, S. E., & Kunci, K. (2024). Analisis Kualitas dan Kuantitas Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik di Negeri

- Rutong. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 3(2), 27–39.
<https://doi.org/10.30598/JPGUVOL3ISS2PP27-39>
- Nurfaizy, R. M., Fajar, M. I., Quraini, D. N., Astriana, Fernanda, M., Kharunnisa, Adni, N. A., & Amrah, W. (2020). *Efektivitas Pelayanan Air Bersih Di Kampung Nelayan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya*.
- OECD. (2022). *ASSESS WATER GOVERNANCE A Methodology Based on the OECD Principles on Water Governance HOW TO*.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Rochmah, S. (2013). *Kebijakan Pelayanan: Studi Pada Kebijakan Pelayanan Air Bersih* (1st ed.). Universitas Brawijaya Press.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, R. D. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* (Cetakan 4). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sumiaty, N. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19. *INTELEKTIVA: E-Journal*, 3(4), 56–67.
<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/661>
- Susan, E. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952–962.
<https://doi.org/10.35673/AJMPL.V9I2.429>
- Syaifulallah, M. T., & Manzilati, A. (2012). Analisis Pemenuhan Kebutuhan dan Penyelesaian Kelangkaan Sumber Daya Air (Studi di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/708>
- Wadu, B. L., Gultom, F. A., & Pantus, F. (2020). Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Oleh Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan*, 10(2), 80–88.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i2>
- Zulhimi, Efendy, I., Syamsul, D., Idawawti, & Masyarakat, K. (2019). Faktor Yang Berhubungan Tingkat Konsumsi Air Bersih Pada Rumah Tangga Di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun. *Jurnal Biology Education*, 7(2), 110–128.
<https://ojs.serambimekkah.ac.id/jurnal-biologi/article/view/1592>